

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **4.1.1 Implementasi Kebijakan Konservasi Pada Revitalisasi Kota Lama**

Berdasarkan analisis keempat variabel model George C. Edward III (1980), implementasi kebijakan konservasi revitalisasi Kota Lama Semarang menunjukkan hasil relatif positif namun belum optimal. Pada komunikasi, SK Walikota dan Perda RTBL menjadi landasan terstruktur, meski terhambat fragmentasi koordinasi antar-lembaga dan terbatasnya sosialisasi. Pada sumber daya, kolaborasi Disbudpar, BPSKL, dan dinas teknis mencerminkan sinergi, namun keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis masih menghambat konservasi berkelanjutan. Pada disposisi, komitmen BPSKL dan Disbudpar mempertahankan prinsip living heritage menunjukkan orientasi positif, meski kesenjangan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat perlu pendekatan lebih inklusif. Pada struktur birokrasi, BPSKL sebagai lembaga koordinatif merupakan inovasi strategis, meski tumpang tindih kewenangan dan ketidakseragaman SOP di antara delapan instansi menjadi tantangan struktural. Secara keseluruhan, implementasi menunjukkan kemajuan signifikan, namun penguatan koordinasi, peningkatan anggaran jangka panjang, dan pemantapan sistem monitoring perlu diprioritaskan untuk keberlanjutan konservasi..

##### **4.1.2 Dampak Revitalisasi Kota Lama Semarang Terhadap Pelestarian Warisan Budaya dan Nilai Historis**

Berdasarkan analisis dampak revitalisasi Kota Lama Semarang terhadap pelestarian warisan budaya dan nilai historis, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi telah menghasilkan capaian signifikan pada aspek fisik dan fungsional kawasan. Restorasi bangunan seperti Oudetrap, pengembangan adaptive reuse, peningkatan infrastruktur, serta program budaya seperti Festival Kota Lama dan Car Free Night menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan kawasan heritage. Dari sisi variabel komunikasi (Edward III, 1980), koordinasi antarinstansi yang relatif terstruktur telah mendorong sinkronisasi kebijakan konservasi, meski inkonsistensi pemahaman standar konservasi di antara pemangku kepentingan masih perlu diperkuat. Dari sisi sumber daya, keterbatasan anggaran APBD menyebabkan sejumlah bangunan bersejarah

belum dapat direstorasi secara optimal, sehingga diperlukan diversifikasi skema pendanaan yang lebih inovatif. Dari sisi disposisi, komitmen BPSKL dan Disbudpar dalam mempertahankan prinsip living heritage menjadi penggerak utama keberhasilan pelestarian fisik kawasan. Dari sisi struktur birokrasi, koordinasi melalui BPSKL telah memberikan kerangka tata kelola yang lebih terpadu. Namun demikian, revitalisasi belum sepenuhnya mengangkat nilai historis secara substantif, mengingat minimnya media interpretasi sejarah yang menyebabkan pengunjung memperoleh pengalaman yang lebih bersifat estetis daripada edukatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan value-based conservation yang tidak hanya melestarikan fisik bangunan, tetapi juga merawat makna kultural dan esensi historis kawasan Kota Lama Semarang.

#### **4.1.3 Pengaruh Revitalisasi Kota Lama Terhadap Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal**

Berdasarkan analisis pengaruh revitalisasi Kota Lama Semarang terhadap transformasi sosial ekonomi masyarakat lokal melalui variabel sumber daya dan komunikasi (Edward III, 1980), revitalisasi telah menghasilkan transformasi yang nyata namun belum merata dalam distribusi manfaatnya. Dari sisi ekonomi, tumbuhnya sektor jasa berbasis pariwisata mencerminkan efek multiplier yang signifikan dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal. Dari sisi sosial, perubahan citra kawasan menjadi ruang publik yang bersih, aman, dan inklusif telah memperkuat kohesi sosial serta mendorong pola interaksi baru antar warga, wisatawan, dan pelaku usaha. Namun demikian, instrumen perlindungan bagi kelompok rentan seperti pedagang tradisional masih belum memadai, sehingga kenaikan nilai ekonomi kawasan berisiko mendorong gentrifikasi. Sistem komunikasi kebijakan juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat terdampak, menyebabkan sebagian warga tidak mengetahui hak dan peluang yang seharusnya dapat mereka akses. Dengan demikian, transformasi sosial ekonomi Kota Lama Semarang masih memerlukan penguatan instrumen kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan agar manfaat revitalisasi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat lokal.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Dampak Revitalisasi Kota Lama Semarang Sebagai Destinasi Wisata Heritage Dalam Perspektif Kebijakan Konservasi” maka beberapa hal perlu diperbaiki, seperti :

1. Penguatan Regulasi Konservasi Berbasis Nilai, sebab Pemerintah Kota Semarang perlu menetapkan regulasi teknis yang mewajibkan penyediaan media interpretasi sejarah (papan informasi, QR code, dan narasi historis terstandar) pada setiap bangunan cagar budaya di Kota Lama Semarang.
2. Optimalisasi Fungsi Edukatif Kawasan sebagai pengelola kawasan, diperlukannya pengembangan sistem interpretasi heritage terpadu berbasis riset akademik guna memperkuat pemahaman publik terhadap nilai historis dan budaya kawasan dalam bentuk kajian.
3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal karena pengembangan wisata heritage harus disertai strategi pembekalan guna pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif agar manfaat revitalisasi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.
4. Perencanaan Berkelanjutan dan Pengawasan Berkala, diperlukan roadmap pengelolaan jangka panjang yang menyeimbangkan pelestarian autentisitas, pertumbuhan ekonomi, serta pengendalian komersialisasi kawasan.